



PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI PILAR PENGUATAN MORALITAS AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI

Pancasila Education as a Pillar of Strengthening Academic Morality in Higher Education

Myta Widyastuti

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI

myta15.widy@gmail.com

ABSTRAK: Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi membawa dampak negatif terhadap moralitas mahasiswa di perguruan tinggi, terutama dalam bentuk degradasi moral. Kondisi ini mengancam karakter dan integritas mereka, serta menurunkan kualitas pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan Pancasila sebagai Pilar Penguatan Moralitas Akademik di Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, meninjau berbagai sumber ilmiah dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan Pancasila dapat memperkuat karakter mahasiswa melalui nilai-nilai keadilan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab. Pendidikan Pancasila juga berfungsi sebagai laboratorium nilai dan alat membangun budaya akademik berkeadaban, serta sebagai benteng moral dalam menghadapi pengaruh negatif globalisasi. Simpulan, penerapan pendidikan Pancasila penting untuk membentuk generasi muda yang berkarakter kuat, bermoral tinggi, dan mampu mempertahankan identitas bangsa. Saran, perlu peningkatan konsistensi kurikulum dan kolaborasi semua pihak untuk optimalisasi peran pendidikan Pancasila sebagai benteng moral di perguruan tinggi.

Kata kunci: Pendidikan, Pancasila, Moralitas.

ABSTRACT: *The development of globalization and technological advancements have resulted in negative impacts on university students' morality, particularly in the form of moral degradation. This condition threatens their character, integrity, and the quality of national education. This study aims to examine the role of Pancasila education as a pillar for strengthening academic morality in higher education. The research employs a descriptive qualitative literature review method, analyzing various scientific sources and policy documents. The findings reveal that implementing Pancasila education can reinforce student character through values such as justice, unity, tolerance, and responsibility. Pancasila education also functions as a laboratory of values and a means of cultivating a civility-driven academic culture, serving as a moral fortress against negative globalization influences. In conclusion, the application of Pancasila education is essential to develop a generation with strong character, high morals, and the ability to uphold national identity. Recommendations include improving curriculum consistency and fostering collaborative efforts among stakeholders to optimize Pancasila education's role as a moral bulwark in higher education.*

Keywords: Education, Pancasila, Morality.

LATAR BELAKANG

Pembaharuan dan perkembangan diibaratkan seperti air yang mengalir hal ini terjadi dalam kehidupan. Kemajuan teknologi dan perkembangan digital terus berkembang semakin pesat membuat

semua informasi bisa didapatkan dengan mudah tanpa batasan, namun hal ini memiliki banyak dampak, ada dampak baik namun tak terkecuali juga menimbulkan dampak negatif. Hal ini sejalan dengan

pendapat (N. Herawati, dkk. 2022), memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital ini, maka akan memanfaatkan dan Sangat mungkin jika teknologi dengan segala isinya dapat memberikan pengaruh pada anak, baik pengaruh positif maupun negatifnya. Semua tergantung dengan siapa yang menggunakannya baik (Frieswaty, dkk. 2020). Saat ini, generasi Y atau generasi milenial ini digadang sebagai penerus tonggak kepemimpinan bangsa ini, dituntut menjadi agen perubahan (Agent of Change) untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara Maju diindikasikan tidak dapat mewujudkan cita-cita bangsa Pasalnya Pendidikan yang idealnya merupakan *transfer of knowledge*, *transfer of value*, *transfer of culture and transfer of religious*. Beberapa waktu belakangan ini, ironisnya sistem Pendidikan hanya menekankan pada hasil akhir. itu artinya, Pendidikan saat ini telah 'kehilangan jiwa'. Kehilangan jiwa di sini adalah Perubahan pola pikir generasi milenial, menyebabkan krisis moral mulai menimpa dunia Pendidikan, terutama di kalangan Perguruan Tinggi. pada dasarnya pelanggaran yang terjadi dalam perkembangan zaman yaitu pengaruh negatif digitalisasi yang menyebabkan penyimpangan batas sikap sopan dan moralitas. Seperti dahulu yang dianggap tabu lalu sekarang menjadi terbiasa, dari yang dahulu dianggap tidak mungkin terjadi menjadi sesuatu yang terjadi. Faktor lain yang menyebabkan penyimpangan adalah mereka tidak dilandasi 4 pilar Kebangsaan: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencetak generasi berkualitas. Sesuai dengan tujuan nasional, yaitu "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya". Akan tetapi dibalik infrastruktur megah dan gemerlap prestasi akademik, tersembunyi masalah mendasar yakni pergeseran nilai sosial ini akibat bentuk pengaruh pertumbuhan zaman khususnya dibidang teknologi. Akhirnya menyebabkan dunia pendidikan menghadapi krisis multidimensi, akibat arus Globalisasi membawa ideologi

materialisme, hedonisme dan individualisme yang menggerus nilai luhur bangsa. Begitu besarnya hedonisme serta kapitalisme mampu membuat mahasiswa kehilangan "jati dirinya" (Israyuda, 2014). Kehilangan jati disini adalah Perubahan pola pikir generasi milenial, menyebabkan krisis moral.

Ini menjadi bukti nyata bahwa sistem pendidikan kita masih belum mencapai target membangun manusia berintegritas. Hal tersebut menampilkan kesenjangan antara pengharapan masyarakat dan pergeseran peran mahasiswa. Peran mereka sebagai agen penegak moral tidaklah begitu maksimal dan optimal yang pada akhirnya berujung pada degradasi moral pada mahasiswa itu sendiri.

Degradasi adalah disini dimaksudkan penurunan kualitas maupun perusakan moral (demoralisasi). Secara etimologi degradasi berasal dari bahasa Inggris *Decadence* yang berarti penurunan, dan bahasa Indonesia degradasi berarti kemunduran, kemerosotan, kesenian, adat istiadat (Mohammad Daud Ali, 2011). Menurut Mulyatno (2022), degradasi moral adalah kemerosotan atau menurunnya moral, tingkah laku manusia akibat faktor-faktor tertentu dan kurangnya kesadaran diri dalam melakukan sosialisasi dengan lingkungan di Masyarakat.

Degradasi moral merupakan bentuk dari melemahnya suatu nilai budaya yang dimiliki oleh Masyarakat yang mengarah pada terbentuknya benturan budaya baru. Perilaku ini, dianggap sebagai penurunan nilai-nilai budaya karena menyimpang dari kebiasaan dan adat pada Masyarakat. Menurunnya kualitas tingkah laku manusia akibat mengikuti hati nurani karena kurangnya kesadaran diri terhadap kewajiban mutlak dan sebagai akibat dari perkembangan globalisasi yang tidak seimbang.

norma kesopanan, beragama, dan keramahtamahan yang semakin tergerus. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi dengan moralitas yang tercermin dari sikap yang tidak menghormati Dosen, teman sebaya. Thomas Lickona dalam Imam Taulabi dan Bustomi mengungkapkan terdapat beberapa indikator penurunan moral, diantaranya yaitu: a. Kekerasan dan tindakan anarki, b. Pencurian, c. Tindakan

kecurangan, d. Abaikan aturan yang berlaku, e. Pertarungan antar siswa, f. Ketidakteraturan, g. Penggunaan bahasa yang memburuk, h. Kematangan seksual terlalu dini dan penyimpangan, i. Sikap penghancuran diri, j. Penyalahgunaan narkoba.

Fenomena ini bukanlah masalah tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling berkaitan. Apa penyebab Degradasi Moral Akademik, yakni: a) Pendidikan Lebih berfokus pada pengembangan kognitif yaitu standar nilai akademik (hasil akhir) sehingga cenderung mengesampingkan aspek afektif dan psikomotor, b) Kurangnya Pendidikan karakter, c) Lingkungan, dan d) Kemajuan Teknologi. Sedangkan akibat dari degradasi moral pada mahasiswa: (a) Penurunan Kualitas Pendidikan: Menurunnya kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kreativitas mahasiswa; (b) Integritas Lulusan Menurun, Lulusan yang secara akademis cerdas namun tidak memiliki integritas yang tinggi; (c) Krisis Kepemimpinan. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan namun terhambat oleh degradasi moral dan intelektual; (d) Ketidakpercayaan Masyarakat.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana Peran kampus dapat menjadi benteng moral dan laboratorium nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Maksudnya, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, persatuan, demokrasi,

dan kemanusiaan yang adil dan beradab (Maola & Dewi, 2021).

Namun fakta lainnya adalah Kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti.

Sudah seharusnya menjadi Benteng Moral karena kampus: Melawan pengaruh negatif, Membangun karakter Mulia, Keteladanan dari Civitas Akademika. Selain itu peran kampus haruslah menjadi Laboratorium nilai-nilai Pancasila. Bentuk Pengimplementasinya adalah: (1) Tempat Pengujian Ilmiah (Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat diuji secara ilmiah, artinya di kampus dapat dianalisis dan diterapkan secara praktis melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik); (2) Mewujudkan keberagaman dan toleransi (kampus tempat berkumpulnya individu dari berbagai latar belakang, suku, agama, budaya) ini menjadikan laboratorium ideal dalam mempraktikkan toleransi dan sikap saling menghormati sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; (3) Sarana untuk berinovasi dan berkontribusi artinya Melalui Tri Darma PT kampus menginkubasi ide-ide dan inovasi yang bermanfaat bagi Masyarakat. Mahasiswa dan Dosen didorong untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berlandaskan Pancasila; (4) Membiasakan musyawarah dan keadilan. Dalam kehidupan kampus praktik musyawarah untuk mufakat dan penerapan keadilan sosial dapat diterapkan secara nyata misalnya melalui organisasi kemahasiswaan dan pengambilan Keputusan yang melibatkan seluruh civitas akademika. Selain itu menetapkan kode etik yang tegas dan transparan mengenai pelanggaran akademik dan sanksi yang adil.

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bukan sekadar mata kuliah wajib, tetapi sarana pembentukan karakter akademik yang berkeadaban. Namun demikian, upaya menumbuhkan rasa bela negara di

kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, tidaklah mudah dan dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Permasalahan utama terletak pada menurunnya kesadaran kolektif akan pentingnya bela negara sebagai bagian dari identitas kebangsaan. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, generasi muda semakin terpapar oleh arus budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Fenomena ini secara perlahan mengikis rasa cinta tanah air, solidaritas kebangsaan, dan semangat untuk berkontribusi dalam mempertahankan keutuhan negara (Heryanto, 2010).

Salah satu tantangan besar adalah terjadinya krisis identitas nasional yang dialami oleh sebagian anak muda. Banyak di antara mereka yang lebih mengenal dan mengidolakan tokoh, budaya, dan gaya hidup luar negeri dibandingkan tokoh nasional dan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini diperparah dengan kurangnya integrasi nilai-nilai bela negara dalam sistem pendidikan formal maupun informal. Pembelajaran yang bersifat kognitif dan akademis seringkali mengabaikan pembentukan karakter dan penguatan sikap kebangsaan, sehingga siswa tidak memiliki keterikatan emosional dan spiritual yang kuat dengan negaranya (Tilaar, 2002).

Selain itu, media sosial dan dunia digital, yang seharusnya menjadi sarana untuk menyebarkan semangat nasionalisme, justru kerap menjadi ruang penyebaran informasi yang bersifat destruktif, provokatif, bahkan radikal. Ketidaksiapan generasi muda dalam menyaring informasi yang mereka terima turut berkontribusi pada berkembangnya sikap apatis, individualistik, dan bahkan sinis terhadap negara (Nasrullah, 2015). Mereka cenderung melihat negara sebagai entitas yang jauh dan tidak relevan dengan kehidupan pribadi mereka, bukan sebagai rumah bersama yang harus dijaga dan diperjuangkan.

METODA

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode

studi literatur (*library research*) sebagai dasar dalam mengkaji berbagai perspektif dan temuan ilmiah mengenai Pendidikan Pancasila sebagai Pilar Penguatan Moralitas Akademik di Perguruan Tinggi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, nilai, dan interpretasi mendalam terhadap fenomena sosial dan pendidikan yang kompleks (Creswell, 2014).

Metode studi literatur digunakan untuk menelusuri dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, baik yang bersifat konseptual maupun empiris. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk memetakan beragam pendekatan, praktik, serta hasil-hasil temuan penelitian terdahulu secara sistematis, guna memperoleh pemahaman yang utuh tentang Pendidikan, Pancasila, Moralitas.

Sumber data dalam studi ini terdiri dari dokumen tertulis yang meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, laporan penelitian, publikasi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan tema penelitian. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi isi, kualitas ilmiah, dan keterkinian sumber.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan isi literatur secara sistematis, kemudian mengkategorisasi tema-tema utama, menyusun perbandingan antar sumber, dan menarik simpulan kritis yang relevan dengan fokus kajian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola pemikiran, kekuatan dan kelemahan dari tiap pendekatan, serta celah yang dapat dijadikan dasar pengembangan gagasan baru atau kebijakan intervensi.

Sebagai langkah validasi, peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai jenis publikasi yang berbeda (akademik dan kebijakan), untuk memastikan keakuratan dan keberagaman perspektif. Peneliti juga menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) untuk mengidentifikasi muatan ideologis, pedagogis, dan psikososial dari setiap dokumen yang dikaji (Krippendorff, 2004).

Dengan pendekatan metodologis ini, diharapkan artikel mampu menyajikan analisis yang kaya, mendalam, dan

berimbang tentang isu degradasi moral akademik di perguruan tinggi dan Pancasila sebagai Pilar Penguat Moralitas.

PEMBAHASAN

1. Degradasi Moral

Degradasi moral berasal dari dua kata yaitu degradasi dan moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Degradasi adalah penurunan, kemunduran atau kemerosotan.

Degradasi adalah disini dimaksudkan penurunan kualitas maupun perusakan moral (demoralisasi). Secara etimologi degradasi berasal dari bahasa Inggris Decandence yang berarti penurunan, dan bahasa Indonesia degradasi berarti kemunduran, kemerosotan, kesenian, adat istiadat (Mohammad Daud Ali, 2011).

Kata moral berasal dari Bahasa Latin Mores. Mores dari kata mos yang berarti adat kebiasaan, kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral dengan demikian dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan. Dari kamus Besar Bahasa Indonesia dari W.J.S. Poerwadarminta terdapat keterangan bahwa moral adalah ajaran tentang baik-buruk perbuatan dan melakukan, sedangkan etika adalah ilmu pengetahuan asas-asas akhlak (moral). Moral merupakan perilaku yang memiliki kesesuaian dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Moral dikatakan sebagai nilai dasar dalam masyarakat untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan yang pada akhirnya yang menjadi adat istiadat masyarakat tersebut.

Robert J. Havighurts yang dikutip oleh Sholeh (dalam Afnizar, 2012) moral yang bersumber dari adanya suatu tata nilai yakni *a value is an obyect estate or affair wich is desired* (suatu objek Rohani atas suatu keadaan yang diinginkan). Maka kondisi atau potensi internal kejiwaan seseorang untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan.

Moral menurut Shaffer dinyatakan sebagai aturan norma dan pranata yang

mampu mengatur perilaku individu dalam menjalani suatu hubungan dengan masyarakat. Menurut Mulyatno, degradasi moral adalah kemerosotan atau menurunnya moral, tingkah laku manusia akibat faktor-faktor tertentu dan kurangnya kesadaran diri dalam melakukan sosialisasi dengan lingkungan di Masyarakat.

Degradasi moral merupakan bentuk dari melemahnya suatu nilai budaya yang dimiliki oleh Masyarakat yang mengarah pada terbentuknya benturan budaya baru. Perilaku ini, dianggap sebagai penurunan nilai-nilai budaya karena menyimpang dari kebiasaan dan adat pada Masyarakat. Menurunnya kualitas tingkah laku manusia akibat mengikuti hati nurani karena kurangnya kesadaran diri terhadap kewajiban mutlak dan sebagai akibat dari perkembangan globalisasi yang tidak seimbang.

Degradasi moral menjadi "penyakit mematikan" Akhirnya berdampak juga pada norma kesopanan, beragama, dan keramahtamahan yang semakin tergerus. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi dengan moralitas yang tercermin dari sikap yang tidak menghormati Dosen, teman sebaya. Thomas Lickona dalam Imam Taulabi dan Bustomi mengungkapkan terdapat beberapa indikator penurunan moral, diantaranya yaitu: a. Kekerasan dan tindakan anarki, b. Pencurian, c. Tindakan kecurangan, d. Abaikan aturan yang berlaku, e. Pertarungan antar siswa, f. Ketidakteraturan, g. Penggunaan bahasa yang memburuk, h. Kematangan seksual terlalu dini dan penyimpangan, i. Sikap penghancuran diri, j. Penyalahgunaan narkoba.

Degradasi Moral akademik menyebabkan Mahasiswa sekarang mulai menyalahi kode etik dan kehilangan 'jati diri' seperti melakukan pelanggaran, yang meliputi: merebaknya pergaulan bebas, ketidakjujuran dalam ujian dan penyelesaian tugas, menyontek atau plagiarisme. Bahkan disisi lain mulai

lunturnya nilai tata krama, norma kesopanan santunan, norma keramahtamahan, tenggang rasa dan toleransi semakin tergerus. Hal ini tercermin dari, mahasiswa memakai pakaian yang tidak layak dipakai dilingkungan kampus, merokok sembarangan, melakukan tindakan-tindakan anarkis yang menimbulkan keresahan di lingkungan kampus. Kemerossotan moral saat ini terjadi pada semua kalangan, yang ditakutkan adalah ketika hal ini terus berkelanjutan akan dianggap biasa dan dijadikan contoh oleh orang lain, dan akhirnya akan semakin tersebar moral-moral yang menyimpang dari norma yang berlaku selama ini.

Fenomena ini bukanlah masalah tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor Penyebab Degradasi Moral Akademik, yakni: Pendidikan Lebih berfokus pada pengembangan kognitif, Kurangnya Pendidikan karakter, Lingkungan, dan Kemajuan teknologi.

Dari faktor itu tentunya juga akan menimbulkan dampak, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh adanya Degradasi Moral yakni: Penurunan Kualitas Pendidikan: Menurunnya kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kreativitas mahasiswa; (b) Integritas Lulusan Menurun, Lulusan yang secara akademis cerdas namun tidak memiliki integritas yang tinggi; (c) Krisis Kepemimpinan. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan namun terhambat oleh degradasi moral dan intelektual; (d) Ketidakpercayaan Masyarakat.

2. Kampus seharusnya menjadi Benteng Moral Dan Laboratorium Nilai-Nilai Pancasila.

Peran kampus sebagai menjadi benteng moral dan laboratorium nilai-nilai Pancasila, merupakan gagasan yang relevan dan penting. Hal ini sesuai dengan Lahirnya ketentuan dalam pasal

35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Maksudnya, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab (Maola & Dewi, 2021). Namun fakta lainnya adalah Kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti.

Sudah seharusnya menjadi Benteng Moral karena kampus: Melawan pengaruh negatif, Membangun karakter Mulia, Keteladanan dari Civitas Akademika.

Selain itu peran kampus haruslah menjadi laboratorium nilai-nilai Pancasila, Bentuk Pengimplementasinya adalah: (1) Tempat Pengujian Ilmiah (Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat diuji secara ilmiah, artinya di kampus dapat dianalisis dan diterapkan secara praktis melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik); (2) Mewujudkan keberagaman dan toleransi (kampus tempat berkumpulnya

individu dari berbagai latar belakang, suku, agama, budaya) ini menjadikan laboratorium ideal dalam mempraktikkan toleransi dan sikap saling menghormati sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; (3) Sarana untuk berinovasi dan berkontribusi artinya Melalui Tri Darma PT kampus menginkubasi ide-ide dan inovasi yang bermanfaat bagi Masyarakat. Mahasiswa dan Dosen didorong untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berlandaskan Pancasila; (4) Membiasakan musyawarah dan keadilan. Dalam kehidupan kampus praktik musyawarah untuk mufakat dan penerapan keadilan sosial dapat diterapkan secara nyata misalnya melalui organisasi kemahasiswaan dan pengambilan Keputusan yang melibatkan seluruh civitas akademika. Selain itu menetapkan kode etik yang tegas dan transparan mengenai pelanggaran akademik dan sanksi yang adil.

3. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bukan sekadar mata kuliah wajib, tetapi sarana pembentukan karakter akademik yang berkeadaban.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pelajaran yang terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter pribadi generasi muda.

Pancasila adalah dasar negara serta falsafah negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila. Nama ini terdiri dari dua kata dari Bahasa Sanskerta: "*Panca*" berarti lima, "*sila*" berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara

bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bahasa Jawa istilah "*syila*" menjadi "*susila*" yang berarti "adab", sikap, perbuatan sesuai dengan "adab", kesantunan, dan budi pekerti yang baik. Konsekuensinya, moralitas ditunjukkan melalui perbuatan atau tingkah laku di samping etika dalam hubungan sosial. Secara Filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup. Secara Yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam Pembukaan UUD 45. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan ideologi dan falsafah dasar negara yang dimaksudkan sebagai pedoman hidup yang menjunjung tinggi keutuhan, persatuan, dan pertahanan negara dan bangsa. Ir. Soekarno mengklaim Pancasila yang berabad-abad terselubung budaya barat merupakan hakikat bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun temurun. Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya ideologi negara.

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk mengembangkan bakat siswa untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan mandiri. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki perilaku dan sikap seperti berikut: 1) Mempunyai sikap yang bertanggung jawab. 2) Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hidup dan mengetahui solusinya. 3) Memahami kemajuan dalam teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan 4) Memahami peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya negara. Mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem Pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Melalui pemahaman dan dengan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila kepada mahasiswa, diharapkan perguruan tinggi dapat membentuk

generasi muda yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi mampu mengembangkan karakter yang kuat, bermoral tangguh, beretika, bertanggung jawab dan berintegritas. Hal ini juga menegaskan bahwa Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan akademis, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter, moral, dan etika bagi para mahasiswa. Ini sebagai bagian dari motivasi dan support untuk meningkatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Masyarakat akademik dan menjadi kunci dalam pencegahan terhadap ideologi-ideologi yang menyimpang dari nilai-nilai yang termaktub dalam sila-sila dalam Pancasila.

Dari sini jelas harusnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bukan sekedar mata kuliah wajib, tetapi sarana pembentukan karakter akademik yang berkeadaban. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing.

SIMPULAN DAN SARAN

Pembaharuan dan perkembangan memiliki dua sisi baik positif dan negatif, yang salah satu dampaknya adalah degradasi moral. Degradasi moral adalah kemerosotan atau menurunnya moral, tingkah laku manusia akibat faktor-faktor tertentu dan kurangnya kesadaran diri dalam melakukan sosialisasi dengan lingkungan di Masyarakat. Degradasi moral merupakan bentuk dari melemahnya suatu nilai budaya yang dimiliki oleh Masyarakat yang mengarah pada terbentuknya benturan budaya baru. Perilaku ini, dianggap sebagai penurunan nilai-nilai budaya karena menyimpang dari kebiasaan dan adat pada Masyarakat. Semua tergantung dengan siapa yang memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital ini,

maka akan memanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang seharusnya sebagai agen perubahan (*Agent of Change*) malah mengalami Degradasi Moral dan menyebabkan pendidikan 'kehilangan jiwa'.

Butuh berbagai cara dan kerja sama dari semua pihak untuk mengatasinya, salah satunya, Peran kampus sebagai menjadi benteng moral dan laboratorium nilai-nilai Pancasila, merupakan gagasan yang relevan dan penting. Maksudnya, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Jelas di sini begitu Pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk membangun karakter di berbagai tingkatan pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Melalui pemahaman dan dengan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila kepada mahasiswa, diharapkan perguruan tinggi dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi mampu mengembangkan karakter yang kuat, bermoral tangguh, beretika, bertanggung jawab dan berintegritas. Sejalan dengan (Putri et al., 2023) Pancasila dalam membentuk etika generasi muda mahasiswa menjadi sangan krusial untuk memastikan nilai-nilai luhur bangsa tetap terjaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya pendidikan bukan sekedar mengajar, tapi membentuk bangsa pendidikan yang sejati bukan hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral bangsa. Peran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bukan sekedar mata kuliah wajib, tetapi sarana pembentukan karakter akademik yang berkeadaban. Artinya, pendidikan diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan

jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Sehingga menjadi agen perubahan yang memiliki integritas, moralitas, dan kesadaran akan tanggung jawab sosialnya. Dengan langkah yang tepat, kita dapat memastikan bahwa generasi muda tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berintegritas.

Mengatasi masalah Degradasi Moral, membutuhkan kolaborasi multi-pihak dengan langkah terukur.

Yang pertama, mahasiswa haruslah mampu berpikir cerdas dengan mengutamakan nilai pendidikan karakter dan moral dalam kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan teknologi secara tepat dan mampu cerdas dalam bermedia.

Selain itu, keluarga yang menjadi lingkungan pertama penanaman nilai adab dan karakter harus membangun komunikasi efektif dengan anak, seperti: menyediakan waktu, memberikan pemahaman akan pendidikan moral dan pendidikan karakter sedini mungkin sehingga membantu mereka mengembangkan kebiasaan baik untuk hidup, serta pentingnya menekankan pengawasan dan ini terus berlangsung sampai remaja dapat menemukan identitas dan aktualisasi pribadinya secara utuh.

Pendidik juga harus menjadi model moral yang dapat dicontohkan, bukan hanya sebagai pengajar materi. Tapi lebih kepada kemampuan menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kegiatan pembelajaran

Perguruan Tinggi pun harus mengintegrasikan pendidikan karakter, pendidikan moral dan Pancasila ke dalam mata kuliah untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.

Selain itu membentuk lingkungan perguruan tinggi yang positif, mandiri, dan kreatif bagi seluruh civitas akademika perguruan tinggi. Agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi keimanan dan ketakwaan, kreativitas, kemandirian, kolaborasi, dan penalaran

kritis. Sehingga mampu membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat dan bernilai Pancasila.

Pemerintah sudah seharusnya memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, visi misi harus jelas mulai dari kurikulum, assesment, dan pelatihan pada guru. Nilai-nilai moral dan sosial juga perlu kembali ditanamkan sejak pendidikan dini, agar Tujuan pendidikan kembali pada esensinya, membentuk manusia yang tidak hanya berilmu tetapi juga merdeka berpikir dan bertindak secara moral.

Pemerintah juga perlu aktif memblokir berbagai situs pornografi, judi, dan konten-konten negatif agar para peserta didik tidak terjerumus ke dalamnya.

Dan yang terakhir. media massa (tv, surat kabar) diharapkan memberi asupan positif bagi mahasiswa tentang tayangan, informasi yang disebar.

PUSTAKA ACUAN

- Carolus Borromeus Mulyatno. (2022). "Jurnal Pendidikan dan Konseling, vol. 4, pp. 1349–1358.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Frieswaty, T. Setiawan, and Y. Paulus Hermanto, (2020). "Mengatasi Degradasi Moral Anak Remaja Akibat Pengaruh Media Sosial," *Kharisma J. Ilm. Teol.*, 1, no. 1, pp. 39–53, [Online]. Available:<http://jurnalsttkharisma.ac.id/index.php/Kharis/>
- Gesmi, Irwan dan Yun Hendri. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila* (Ponorogo: uwais Inspirasi Indonesia).
- Heryanto, A. (2010). *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hamid, I. (2022). *Cegah degradasi moral dengan bimbingan kesalehan sosial*, Cetakan 1. sukabumi: Cv. Haura Utama.

- Ishaq. (2021). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Kencana, 2021
- Israyuda. (2014). "Degradasi Moral Mahasiswa". Dalam <https://israyuda.wordpress.com/tag/degradasi-moral-mahasiswa/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Jakarta: Balai Pustaka.
- Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Maola, P.S., & Dewi, D.A. (2021). Membangkitkan Sikap Nasionalisme Bagi Generasi Muda Melalui Implementasi Pendidikan Nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, 4(3), 248-253.
- Mohammad Daud Ali. (2011). Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- N. Herawati, D. Sri, and A. Rusmana. (2022). "Peran Guru Sebagai Opinion Leader Dalam Mengatasi Degradasi," vol. 3, no. 1, pp. 14–29
- Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sahriansyah. (2014). Ibadah dan Akhlak. Banjarmasin: IAIN Antasari Pres.
- Taulabi, Iman dan Bustomi Mustofa, (2019). Dekadensi Moral Siswa dan Penanggulangan Maelalui Pendidikan Karkter, vol.30 No.1, Januari-Juni.
- Tilaar, H. A. R. (2002). Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat (5) tentang Pendidikan Tinggi.